Mitigasi Kesalahan Targeting Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemik

Martin Siyaranamual

Kepala Monitoring dan Evaluasi, TNP2K

Dosen, Departemen Ilmu Ekonomi, UNPAD

19 Mei 2020

Isi Presentasi

Sistem perlindungan sosial di Indonesia

- Bantuan sosial dan jaminan sosial
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Proses Pendataan Penduduk Miskin

- Mekanisme pendataan
- Informasi yang tersedia
- Kesulitan dalam pengelolaan DTKS

Memperluas cakupan DTKS

- Menemukan mereka yang butuh bantuan
- Verifikasi target

Pelajaran dari pandemik

- Tujuan bansos di masa pandemik
- Sistem perlindungan sosial di masa depan

SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA

Saat ini, Indonesia memiliki dua skema…

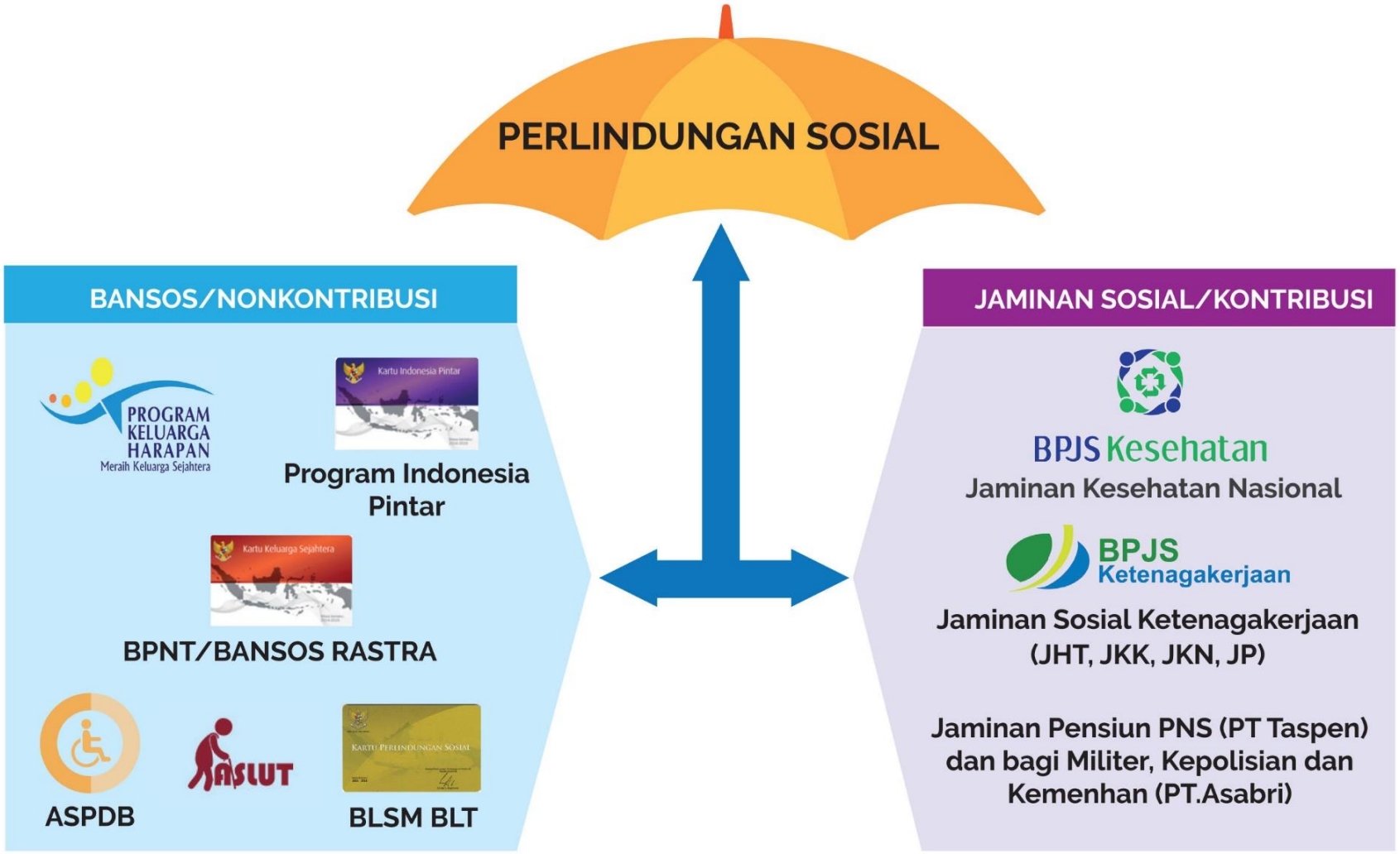

- Skema non-kontribusi didanai dari pajak dan dikhususkan untuk kelompok miskin dan rentan.
- Skema kontribusi didanai dari kontribusi peserta jaminan.

TNP2K, 2018

Targeting untuk skema bansos

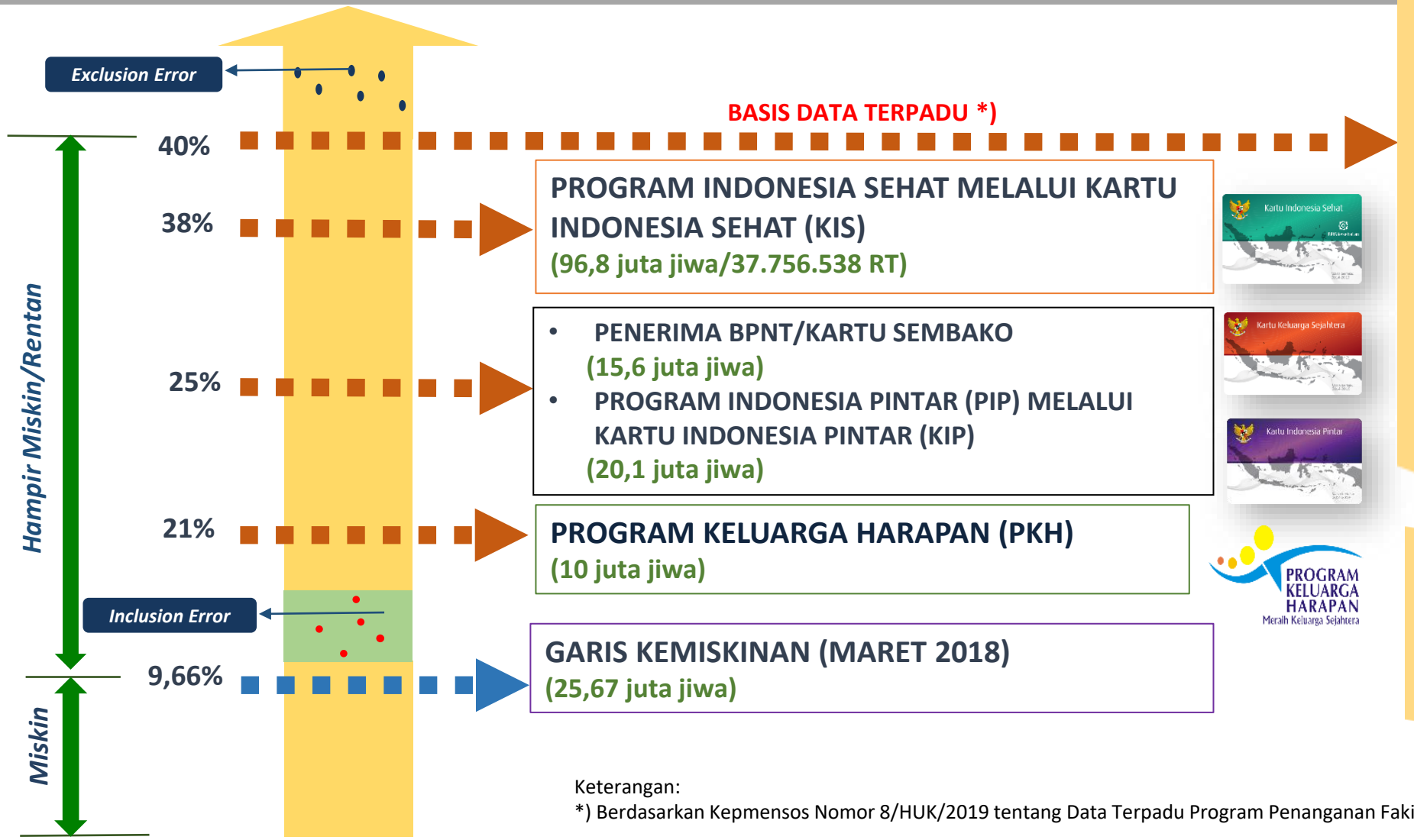

BDT BERBASIS KELUARGA

Jumlah Rumah Tangga (RT)
27.308.510

Jumlah Keluarga (KK)
31.430.304

Jumlah Penduduk (Jiwa)
99.359.312

BDT BERBASIS NONKELUARGA

Individu (Jiwa)
509.041

Keterangan:
*) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu – Januari 2019

Bahan rapat yang diperoleh penulis di rapat TNP2K

Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial 2020

APBN Tahun 2020
untuk Perluasan Perlindungan Sosial menuju 60% Masyarakat Terbawah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat

Rp372,5 T

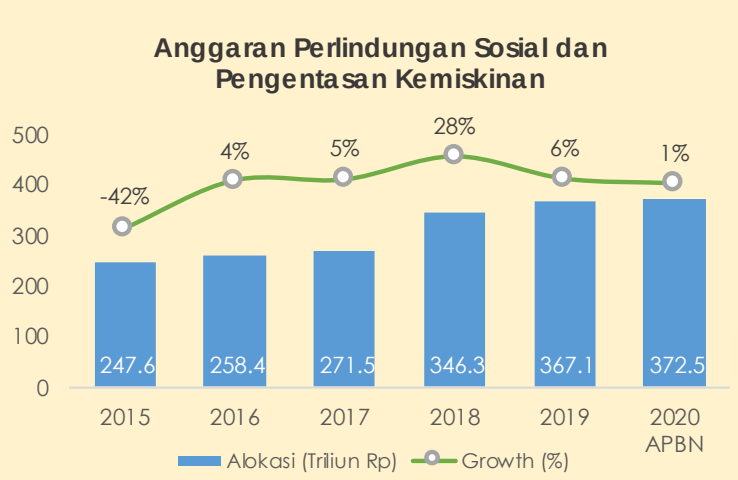

Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Pelayanan Dasar

- Program Keluarga Harapan
  Rp29,1 T
  10,0 juta keluarga miskin
- Bantuan Pangan/Kartu Sembako
  Rp28,1 T
  15,6 juta keluarga miskin
- KIP Kuliah
  Rp 6,7 T
  819,4 ribu mahasiswa
- Kartu Indonesia Pintar (SD/SMP/SMA sederajat)
  Rp 11,2 T
  20,1 juta jiwa
- Subsidi Energi
  Rp125,3 T
- PBI JKN
  Rp 48,8 T
  96,8 juta jiwa

Pemberdayaan Masyarakat

- Pembiayaan Ultra Mikro
  Rp1,0 T bagi 241 rb debitur
  (1,6 juta debitur akumulasi)
- Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat
  Rp13,8 T bagi 16,47 juta debitur (akumulasi)
- Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif
  Rp270 M bagi 135 ribu KK
- Bantuan untuk Nelayan
  a.l. Premi Asuransi **Rp33,0 M** untuk 170 rb nelayan

Akses Perumahan

- Subsidi Uang Muka Perumahan
  Rp600 M bagi 150 rb Keluarga (MBR)
- Subsidi Bunga Kredit Perumahan
  Rp3,9 T bagi 677 rb Keluarga (MBR)

Mendukung Pengembangan Perekonomian Desa

- Dana Desa
  Rp72,0 T untuk 74.954 desa termasuk:
  - 20.588 desa tertinggal
  - 6.835 desa sangat tertinggal

Peningkatan Produktivitas Pertanian

- Subsidi Pupuk
  Rp26,6 T bagi 16,2 juta petani

Bahan rapat yang diperoleh penulis di rapat TNP2K

PROSES PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

Mekanisme pendataan DTKS

Pembangunan satu basis data terpadu diawali dengan pelaksanaan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011).

Dimutakhirkan melalui proses Forum Konsultasi Publik (FKP) dan verifikasi-validasi data rumah tangga.

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu.

Saat ini pengelolaan DTKS berada di Kemensos.

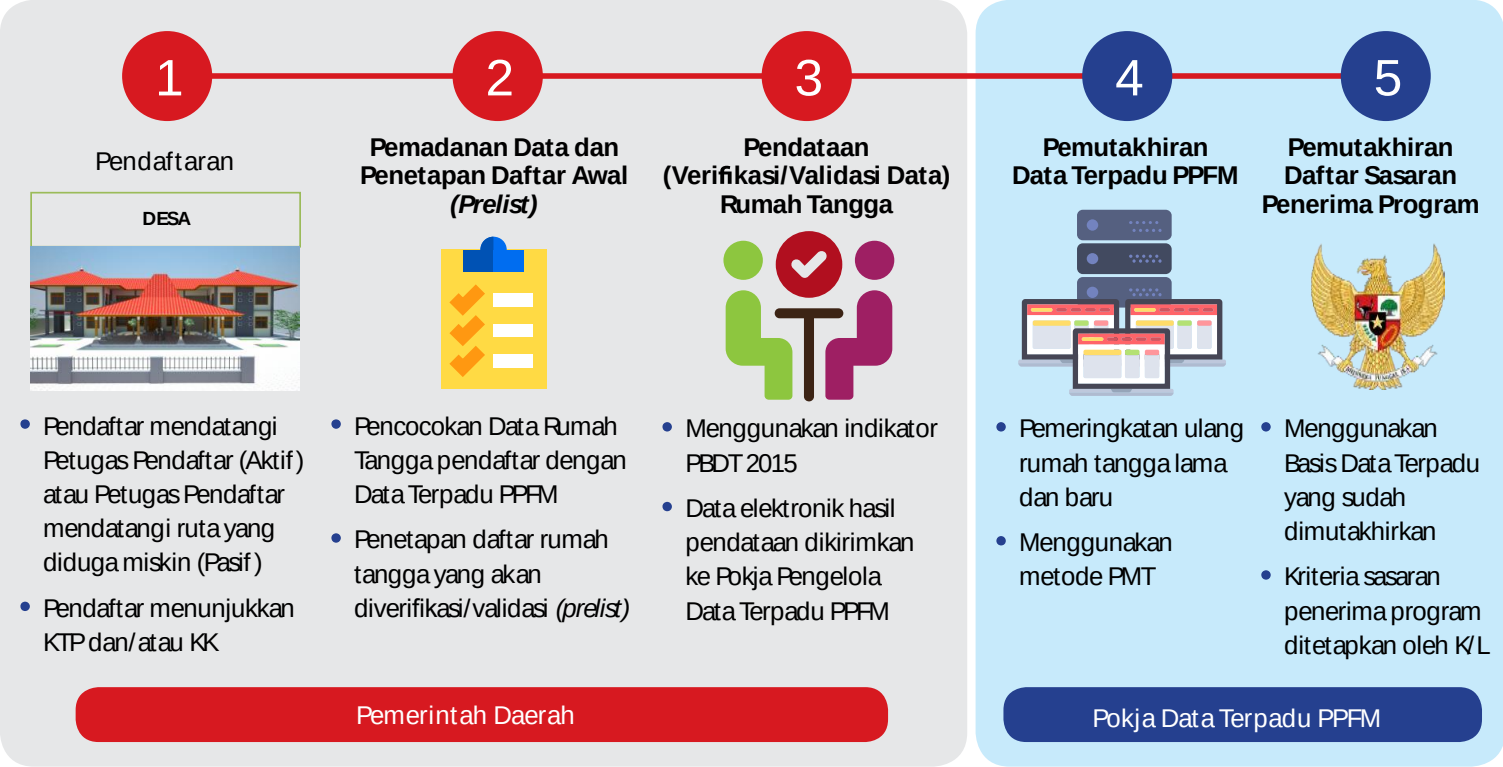

Pemeringkatan menggunakan metode *proxy mean testing* (PMT).

Bersumber dari publikasi TNP2K (2017)

Informasi di dalam DTKS

DTKS menyediakan informasi yang lengkap mengenai hidup dan penghidupan dari penduduk miskin.

Informasi tersebut dibedakan pada level rumah tangga dan individu.

- Lokasi rumah tangga
- Sosio-ekonomi, demografi, dan kesehatan dari seluruh anggota rumah tangga
- Ketenagakerjaan
- Keterangan perumahan dan harta
- Status kesejahteraan yang dihitung berdasarkan PMT

Ada beberapa masalah umum yang juga terjadi di dalam DTKS.

Inclusion/exclusion errors dari DTKS saat ini sekitar 20%.

Dimensi diskusi yang sering dilupakan…

Kesulitan untuk mengunjungi ruta yang berada di lokasi terpencil.

Kebutuhan dana yang besar untuk pemuktahiran data.

Banyak daerah yang tidak memiliki SDM untuk melakukan pemuktahiran.

Tidak semua pemerintah daerah secara aktif membantu proses pemuktahiran.

Total area:1,9 juta km^2

Negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia (di atas 270 juta jiwa)

Jumlah pulau: 17 ribu lebih

MEMPERLUAS CAKUPAN DTKS

Bagaimana menemukan mereka yang membutuhkan bantuan di masa pandemik?

Dampak pandemik, walaupun bersifat universal, akan tetapi regresif terhadap kelas ekonomi.

68% penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin dan rentan terhadap goncangan ekonomi (Bank Dunia, 2018).

Mayoritas dari mereka bekerja di sektor industri dan jasa sebagai tenaga kerja kerah biru.

Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan kelas tiga, khususnya sebelum ada kenaikan iuran.

Peran pemerintah di tingkat Kelurahan/Desa krusial.

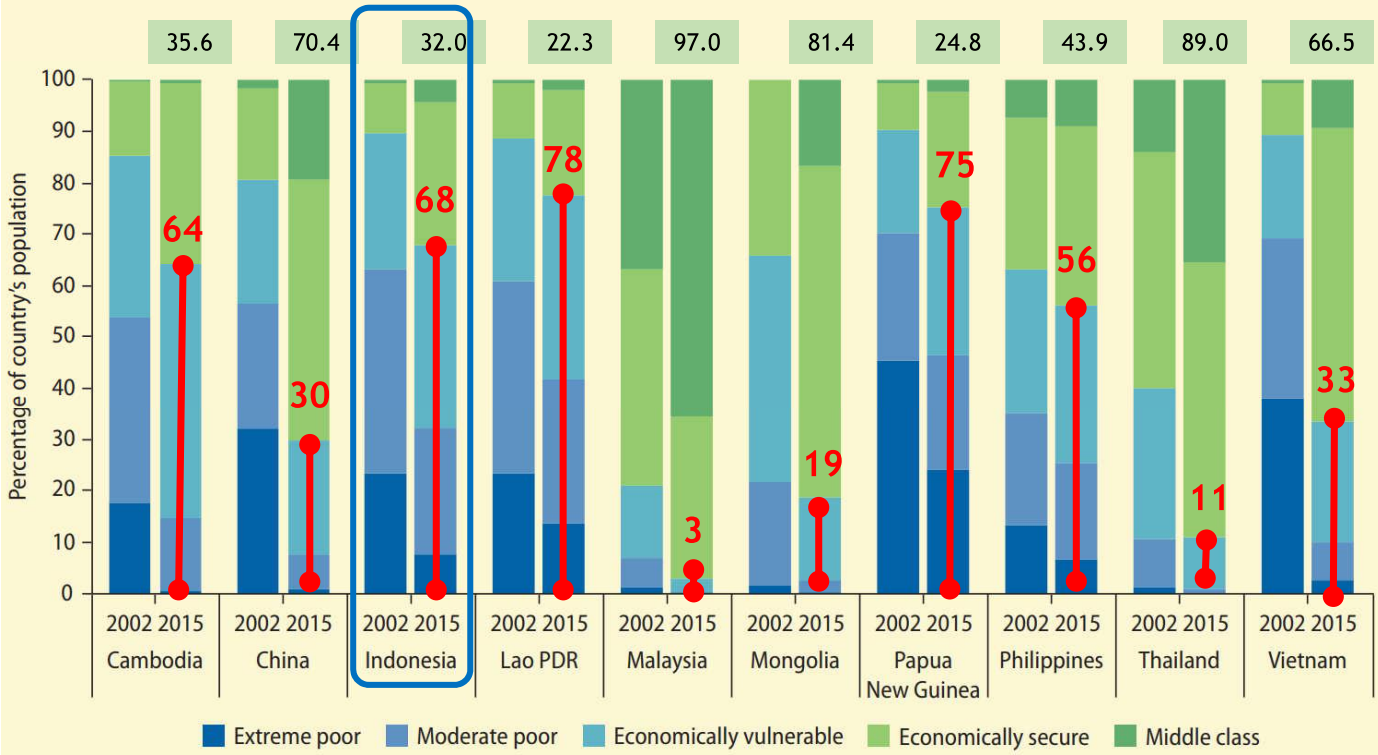

Walaupun angka kemiskinan Indonesia turun setiap tahunnya, akan tetapi jumlah penduduk rentannya salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik.

Proses verifikasi target

1. Berdasarkan data-data dari sumber-sumber yang baru:
   i. Data-data yang bersumber dari RT/RW.
   ii. Kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 3, khususnya sebelum kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir.
   iii. Data mitra transportasi online dan angkutan publik konvensional.
   iv. Pekerja mall, restoran, dan hotel.
2. Sandingkan sumber data alternatif dengan data DTKS.
   - Keluarkan mereka yang sudah di DTKS.
3. Tentukan ranking berdasarkan kondisi demografi.
   - Keluarga dengan ibu hamil lebih layak dibandingkan yang tidak.

PIKOBAR adalah layanan informasi Covid-19 yang diperluas menjadi layanan pengaduan mengenai JPS Covid-19.

Proses verifikasi ideal tidak mungkin dilakukan dalam situasi saat ini. Sehingga diskusi mengenai inclusion/exclusion error dapat dikesampingkan.

PEMBELAJARAN DARI PANDEMIK

Bansos pandemik bukan untuk pengentasan kemiskinan!

Bansos pandemik bertujuan **meredam naiknya angka kemiskinan akibat pandemik**.

Dampak pandemik bersifat universal, dengan distribusi yang berbeda untuk setiap sektor.

Bagaimana efektivitas bansos tersebut?

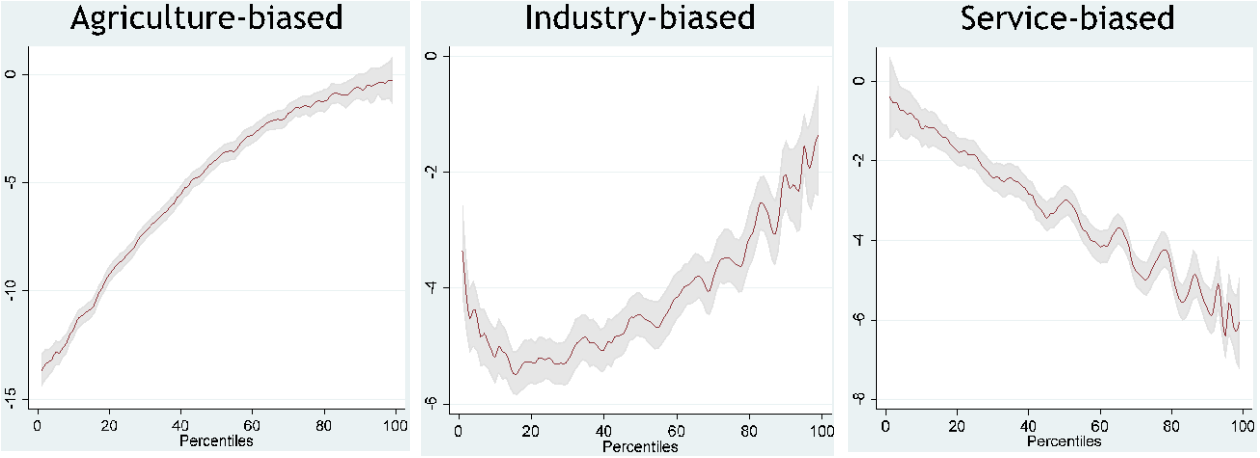

Persentase turunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga per sektor per kelas ekonomi.

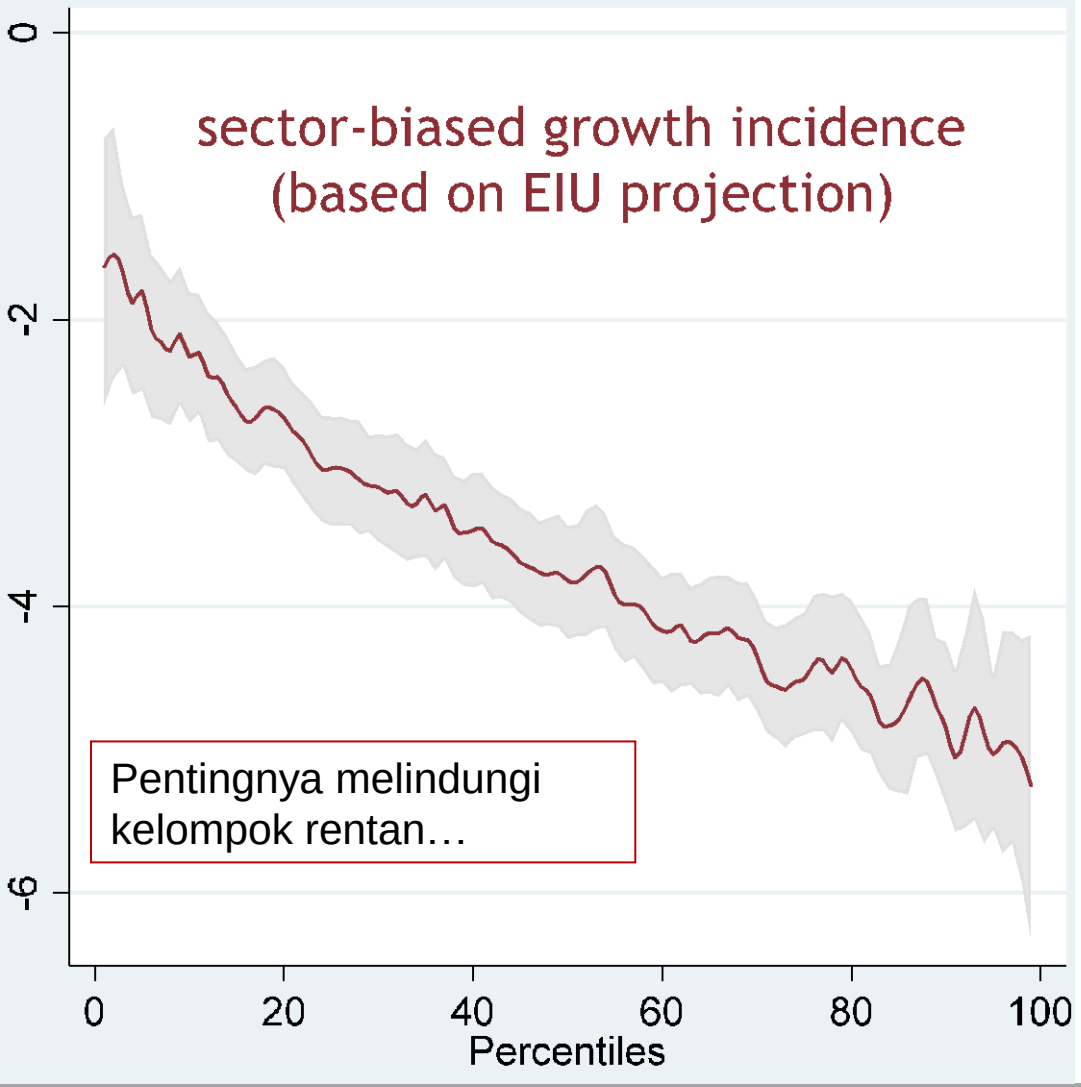

Grafik bersumber dari Yusuf (2020)

Membangun perlindungan sosial

Berbagai jenis krisis yang bersifat universal.

Krisis yang berbagai jenis dan bersifat universal membutuhkan solusi yang adaptif dan universal.

Pembangunan perlindungan sosial yang bersifat adaptif harus dimulai dengan perluasan cakupan DTKS.

Pendataan berbasis komunitas yang dikombinasikan dengan PMT.

Kelembagaan dari pengelola dana perlindungan sosial.

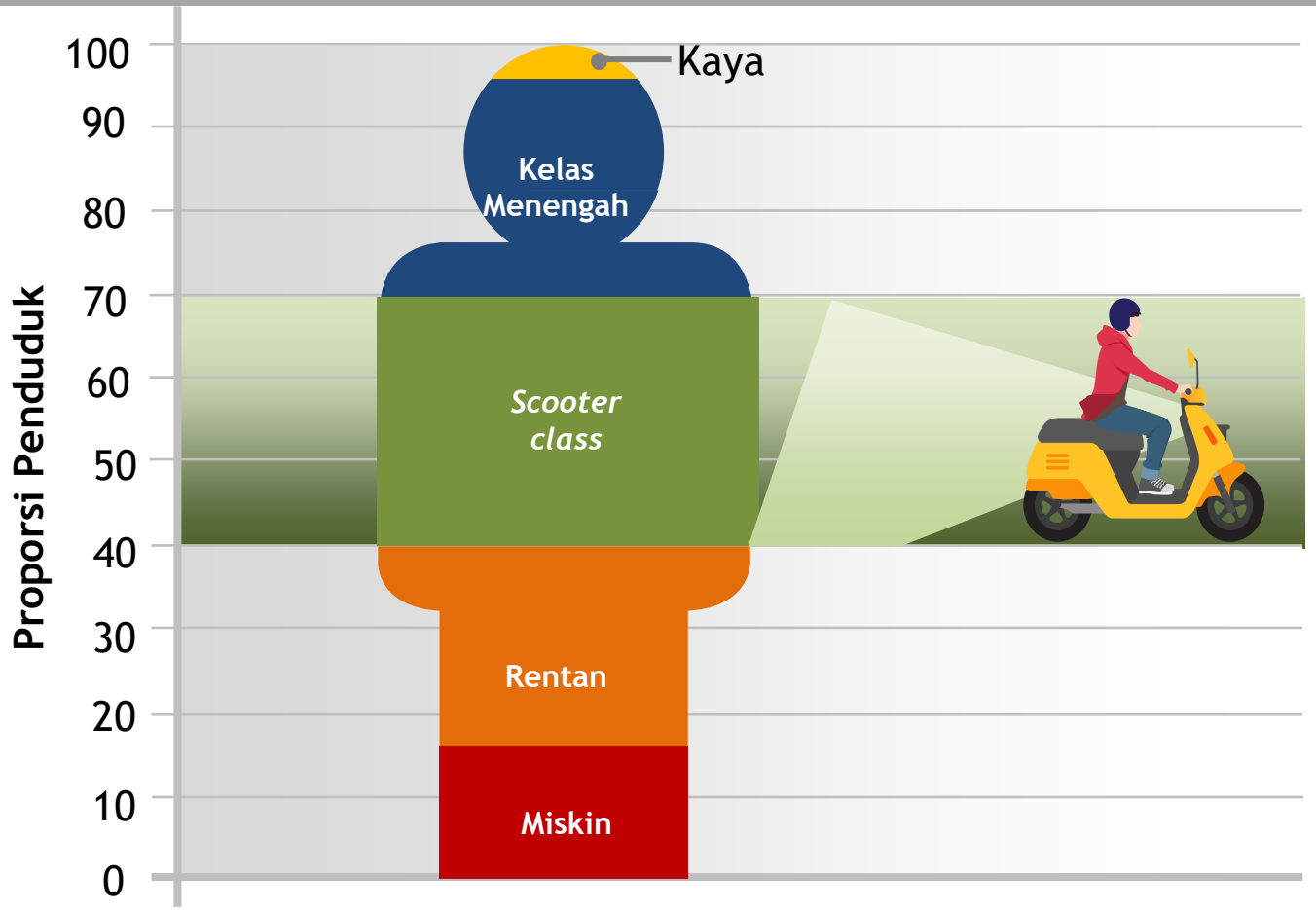

TNP2K, 2018

Terima Kasih

Martin Siyaranamual
Universitas Padjadjaran